

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KOMITE AUDIT
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN (STUDI PADA SEKTOR
PERBANKAN YANG TERDAFTAR PADA BEI TAHUN 2018-2021)**

Oleh:

Junior Zega ¹⁾

Derfan Waya ²⁾

Torang P. Simanjuntak ³⁾

Nazlah Rahma Panggabean ⁴⁾

Universitas Darma Agung ^{1,2,3,4)}

E-Mail:

zegajunior8@gmail.com ¹⁾

dervanwaya@gmail.com ²⁾

torang@darmaagung.ac.id ³⁾

nazla89gabe@gmail.com ⁴⁾

ABSTRACT

This study to determine the results of influenc of institutional Ownership and audit Committees on Corporate Tax Avoidance (Studies in Banking Sector Listing the Indonesia Stock exchange in 2018-2021. In this study there were 20 samples with a 4-year financial reporting period. Based on the research results Variables Institutional ownership this can be seen from the results of the t test < t table (1.351 < 1.692) at a significance level of 0.187, variable X1 has an effect on Y, this can be seen results of the t test > t table (3.412 > 1.692), at a significance level of 0.002 < 0.05) and variable X2 has an effect on Y, this can be seen from the test results t count > t table (2.081 > 1.692), Sig 0.046 < 0.05). The ability of the variables X1 and X2 to influence the dividend variable is 0.304 or 30.4% % and the remaining 69.6% is influenced by other variables, which means that the variables X1 and X2 jointly affect the variable Y. . The that in the interval criterion the correlation coefficient of the current ratio, return on investment, and dept to equity ratio has a low level of relationship to variable Y. Variables X1 and X2 simultaneously influence Y, seen from the value of F count > F table (5.660 > 4.07), and a significance level of 0.004 < 0.005.

Keywords: *institutional ownership, audit committee and tax avoidance*

ABSTRAK

Pada pengamatan ini terdapat contoh sejumlah 20 dengan periode laporan keuangan 4 tahun. Berdasarkan hasil penelitian Variabel kepunyaan Institusional tidak berpengaruh terhadap ETR, ini dapat dilihat dari hasil uji t hitung < t tabel (1,351 < 1,692) pada tingkat signifikansi 0,187, variabel X1 berpengaruh terhadap Y, ini dapat dilihat dari hasil uji t (3,412 > 1,692), pada tingkat signifikan 0,002 < 0,05) dan variabel X2 memiliki pengaruh terhadap Y, ini didapatkan dari hasil uji t hitung > t tabel (2,081 > 1,692), Sig 0,046 < 0,05). Kemampuan variabel X1 dan X2 untuk mempengaruhi item dividen sebesar 0,304 atau 30,4% % dan sisanya 69,6 % dipengaruhi oleh variabel lain, yang artinya bahwa item X1 dan X2 secara bersamaan saling mempengaruhi terhadap variabel Y. Poin pada kriteria interval koefisien korelasi *current ratio*, *return on investment*, dan *dept to equity ratio* memiliki cakupan hubungan pada variabel Y yang

rendah. Variabel X1 dan X2 berpengaruh secara simultan terhadap Y, didapatkan dari poin F hitung $> F$ tabel ($5,660 > 4,07$), dan cakupan signifikansi $0,004 < 0,005$.

Kata kunci: kepemilikan Institusional, Komite Audit dan Penghindaran Pajak

PENDAHULUAN

Pembangunan dalam Negara ini membutuhkan dana yang sangat besar dimana dana tersebut diperoleh dari dua hasil yaitu hasil dari pajak dan non pajak. Hasil terbesar dari pajak yang dihasilkan dari negeri sendiri (Damayanti dan Susanto, 2019). UU No.28 Tahun 2007 sebagaimana diganti dalam UU Harmonisasi Perpajakan (HPP) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak dijelaskan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang orang pribadi bahkan badan yang sifatnya sangat dipaksakan sesuai perundang-undangan, tidak mendapat balasan cepat dan dipakai untuk keperluan negara bagi kebesaran dan kemakmuran. sesuai isi perundang-undangan tersebut, terdapat dengan jelas kalau pajak penerimaan bangsa. Pajak bagi perusahaan yang harus dan yang dapat mengurangi keuntungan (laba). Negara menjadikan penerimaan pajak besar tetapi perusahaan mendapatkan pembayaran pajak sedikit mungkin. Pajak menjadi pengaruh besar untuk menjadikan pembangunan sebab pajak adalah hasil dari pendapatan terbesar negara.

Pada penelitian ini, peneliti akan lebih mengarahkan penelitian sektor perbankan yang saat ini sangat ramai diperbincangkan dalam dunia pasar modal, dengan demikian perlu peneliti menggali informasi yang lebih dalam lagi sehingga dapat memberikan solusi dari beberapa pertanyaan yang berkesinambungan dalam dunia perbankan, sehingga para calon investor dan para pengguna laporan keuangan perbankan dapat mengambil satu keputusan untuk berinvestasi pada saham perbankan. Dari masalah yang telah dijabarkan diatas serta tahapan pertanyaan-pertanyaan tersebut

sesuai judul: “ Pengaruh kepemilikan Institusional Dan Komite Audit Terhadap penghindaran pajak Perusahaan (kasus di bagian Perbankan Yang Terdaftar Pada BEI Tahun 2018 – 2021”.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pajak

Dari berbagai defenisi tentang pajak di atas maka bisa diperoleh kalau pajak merupakan kontribusi oleh masyarakat kepada negara yang bersifat wajib dan memaksa yang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan berbangsa dan bernegara serta menjalankan dan menyelenggarakan pemerintahan tanpa ada imbalan secara langsung yang diberikan kepada masyarakat tersebut.

Pengertian pajak merupakan poin baik yang harus dipaksa sepihak oleh dan terutang dari penguasa (sesuai aturan yang dibuatkan secara massal) tanpa adanya ujur rasa , dan semata-mata dipaksakan untuk kebutuhan dan pengeluaran umum.

B. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan ditetapkan pendapatan yang diperoleh bahkan dihasilkan orang pribadi bahkan perseorangan ataupun badan. Dasar hukum Pajak pendapatan di Indonesia diatur dalam uu Nomor 36 Tahun 2008 yang menjadikan perubahan ke 4 uu Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak pendapatan. Judisseno (2005:82), Pajak pendapatan suatu pungutan resmi yang diwajibkan kepada masyarakat yang berpendapatan atau pendapatan diperoleh dan didapatkannya untuk tahun pajak untuk kepentingan bangsa, masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara suatu keharusan yang harus dilaksanakan.

C. Penghindaran Pajak

Agency theory materi keagenan di lingkup penjaualan pajak terjadi sesuatu perbedaan kebutuhan manajemen (agent) dan pemasok (*principal*). Peraturan mengetahui akan cara kerja perusahaan dan berkeharusan mentoletasikan informasi kepada manajemen. Menurut Jensen and Meckling di Martani (2018) manager menjadi agent tidak selalu bertindak sesuai kebutuhan pemilik saham principal. Perbedaan kebutuhan diantara penguasa dengan pemasoknya menumbuhkan *agency problem* jadi dipergunakan penerapan *corporate governance* bahkan cara pengolahan perusahaan baik. Pembayaran pajak pada keuntungan yang didapatkan perusahaan.

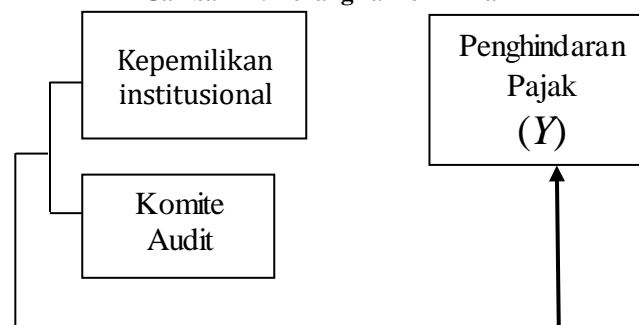
Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*), suatu perusahaan akan menjamin pendapatan keuntungannya besar bahkan menekan biaya yang harus diberikan, merupakan salah 1 cara yang dibuatkan sesuai penghindaran pajak. Penghindaran pajak dibuatkan dengan menggunakan celah kelemahan yang tertampil pada perundang-undangan dan hukumnya perpajakan. Kepunyaan institusional

merupakan kepunyaan saham di institusi, kepunyaan di perusahaan atau lembaga lain. Kepunyaan saham pihak yang berwujud badan antaranya asuransi, bank, investasi, dan kepunyaan institusi lainnya.

Dalam menjadikan pembuat pengolahan perusahaan baik, perusahaan publik diharuskan untuk membuat komite audit. suatu yang sama Pasal 1:1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tahun 2015 pedoman dan pembentukan Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“Peraturan OJK 55/2015”), Komite Audit merupakan komite yang dibuat menjadi tanggung jawab kepada Dewan Komisaris mengemban untuk menampilkan tugas juga fungsi Dewan Komisaris. Dari arti tersebut jadi kesimpulannya kalau pengayom audit komite dibentuk bertanggung jawab kepada dewan komisaris. pengamatan ini adalah pengamatan lebih lanjut atau replikasi dari beberapa pengamatan yang telah dibuat oleh beberapa pengamat. pengamatan yang telah dilakukan membantu membuat tugas dan fungsi dewan komisaris.

D. Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Sumber: Data diolah Penulis

METODE PENELITIAN

Dalam pengamatan ini menggunakan jenis data sekunder yang adalah asal file pengamatn yang didapatkan pengamat dengan jauh jauh. file didapatkan di media perantara juga dicatat oleh pihak lain. asal

file dalam pengamatan ini merupakan susunan dana badan sektor Perbankan ditampilkan dan di publish di Bursa Efek Indonesia di periode 2018-2021.

Di pengamatan ini, pengamat mengelola susunan dana. Susunan dana diprses

meliputi neraca, laporan keuntungan rugi, data arus kas juga catatan atas data keuangan di perusahaan dagang tertampil di Bursa Efek Indonesia (BEI) di 2018-2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari cerita , pasar modal telah dibuatkan sebelum indonesia merdeka. Pasar sumber bahkan bursa efek dibuat sejak jaman pemimpin belanda di saat tahun 1912 Batavia. Pasar sumber ketika itu dihadirkan pemerintah Hindia Belanda guna keperluan pemerintah colonial. walaupun pasar sumber jadi ada dari 1912, kenaikan juga pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang didapatkan, bahkan pada beberapa periode kejadian pasar sumber mengalami kevakuman. Hal ini dibuatkan

beberapa masalah contohnya perang dunia 1 dan 2, perpindahan penguasa pemerintah colonial untuk pemerintah Republik Indonesia, berbagai masalah yang menjadikan operasi Bursa Efek tidak dapat berjalan semestinya.

Pemerintah RI menghidupkan kembali pasar modal pada tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian pasar sumber terjadi kebangkitan seiring dengan jenis insentif juga regulasi diterapkan pemerintah. Secara singkat, tonggak perkembangan pasar modal. Adapun contoh dalam pengamatan ini adalah sebanyak 20 perusahaan. Berikut ini adalah cerita obyek pengamatan pada perusahaan perbankan yang terlihat di Bursa Efek Indonesia sebagai berikut.

Tabel 1. Data institusional, komite audit dan penghindaran pajak pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021

No	Kode	Tahun	Kepemilikan institusional	Komite audit	Penghindaran pajak
1	BABP	2018	2,22	0,07	0,54
		2019	5,11	0,07	0,19
		2020	4,79	0,15	0,18
		2021	0,83	0,28	0,45
2	BACA	2018	8,63	0,20	0,17
		2019	7,19	0,22	0,18
		2020	8,05	0,22	0,17
		2021	2,42	0,11	0,55
3	BBCA	2018	1,95	0,13	0,51
		2019	2,53	0,13	0,45
		2020	1,13	0,23	2,56
		2021	1,50	0,05	0,87
4	BBKP	2018	1,06	0,05	0,93
		2019	1,27	0,06	0,77
		2020	1,43	0,03	0,18
		2021	0,82	0,52	1,35
5	BBNI	2018	0,77	0,42	1,47
		2019	0,73	0,41	1,52
		2020	0,71	0,35	1,34
		2021	2,38	0,10	1,02
6	BBRI	2018	2,65	0,10	1,05
		2019	3,42	0,10	0,92
		2020	2,45	0,12	0,48
		2021	1,02	0,03	1,07
7	BBTN	2018	1,68	0,05	1,20
		2019	1,29	0,05	1,07
		2020	1,33	0,04	1,10
		2021	4,19	0,13	0,23
8	BDMN	2018	4,39	0,12	0,16
		2019	4,44	0,15	0,16
		2020	4,29	1,13	0,19
		2021	0,99	0,10	1,83
9	BGTG	2018	1,18	0,10	0,69
		2019	1,53	0,08	0,83
		2020	1,23	0,066	0,75

		2021	1,24	0,09	0,56
10	BMRI	2018	2,25	0,02	0,61
		2019	3,55	0,02	0,50
		2020	1,69	0,05	0,51
		2021	1,45	0,08	0,41
11	BNBA	2018	1,01	0,01	1,46
		2019	1,00	0,01	1,76
		2020	1,01	0,02	1,33
		2021	1,02	0,03	1,24
12	BNGA	2018	0,07	0,07	2,22
		2019	0,07	0,07	5,11
		2020	0,15	0,15	4,79
		2021	0,28	0,28	0,83
13	BNII	2018	0,20	0,20	8,63
		2019	0,22	0,22	7,19
		2020	0,22	0,22	8,05
		2021	0,11	0,11	2,42
14	BNLI	2018	0,13	0,13	1,95
		2019	0,13	0,13	2,53
		2020	0,23	0,23	1,13
		2021	0,05	0,05	1,50
15	BSIM	2018	0,05	0,05	1,06
		2019	0,06	0,06	1,27
		2020	0,03	0,03	1,43
		2021	0,52	0,52	0,82
16	BTPN	2018	0,42	0,42	0,77
		2019	0,41	0,41	0,73
		2020	0,35	0,35	0,43
		2021	0,10	0,10	2,38
17	INPC	2018	0,17	0,10	2,65
		2019	0,16	0,10	3,42
		2020	0,12	0,12	2,45
		2021	0,14	0,03	1,02
18	MAYA	2018	0,05	0,05	1,68
		2019	0,05	0,05	1,29
		2020	0,04	0,04	1,33
		2021	0,13	0,13	4,19
19	MEGA	2018	0,12	2,25	4,39
		2019	0,15	3,55	4,44
		2020	1,13	1,69	4,29
		2021	0,10	11,45	0,99
20	NISP	2018	2,25	0,02	0,61
		2019	3,55	0,02	0,50
		2020	1,69	0,05	0,51
		2021	1,01	0,01	1,46

Sumber: Data diolah penulis (2023)

A. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah bagian statistik yang bertujuan menjelaskan atau memberi gambaran terhadap objek yang diamati dari data contoh atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan pengamatan dan dibuat kesimpulan yang berlaku umum

dari informasi tersebut. Statistik deskriptif dipakai dengan menjelaskan sebuah informasi didapatkan di mean, media, deviasi, standar, poin minimum, juga poin maximum. Statistik deskriptif di pengamatan ini didapatkan di tabel ini:

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kepemilikan institusional	80	,10	8,63	2,6882	2,12178
Komite audit	80	,01	,52	,1227	,12009
Penghindaran pajak	80	,16	1,83	,7955	,50189
Valid N (listwise)	80				

Sumber: Olahan Penulis Hasil Output SPSS 22, (2023)

Sesuai dengan tabel di atas dapat dijelaskan jumlah pengamatan yang diamati sesuai 4 masa belakang materi dana tahunan (2018- 2021), di statistik deskriptif dapat diperoleh poin mean, serta urutan penyebaran (standar deviasi) di tabel akan diamati. poin mean adalah poin memberitahukan besaran pengaruh suatu item independen di variabel dependen.

1. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dibuatkan untuk menjelaskan kalau jenis regresi terakumulasi korelasi antara item bebas (item independen). Pada jenis regresi baik seharusnya tidak mempunyai korelasi diantara variabel independen. Cara ini yang dibuatkan untuk meneliti multikolinieritas yaitu memperhatikan poin *tolerance* bahkan lawannya *variance inflation factor* (vif). Kriteria pembuatan kesimpulan adalah: Hasil uji multikolinieritas didapatkan pada table 3.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1 (Constant)	,491	,210			
Kepemilikan int	,040	,029	,311	,404	2,474
Komite audit	,148	,043	,533	,922	1,085

a. Dependent Variable: Penghindaran pajak

Sumber: Olahan Penulis Hasil Output SPSS 22 (2023)

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa poin a poin Tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10. keputusan ini menjelaskan kalau tidak terjadi gejala multikolinearitas antar 49 variabel bebas, artinya semua variabel bebas bias pakai untuk diamati lebih lanjut.

2. Uji Autokorelasi

Autokorelasi terjadi akibat observasi yang didapatkan sesuai urutan sepanjang waktu berhubungan satu sama lain. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dapat diujinya dengan uji *durbin-Watson*. Jika dw didalam antara du dan (4-du), maka hipotesis akan termasuk artinya tidak ada autokorelasi (du < dw < 4-du).

Tabel 4. Uji dari hasil Autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut ini Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,678 ^a	,459	,403	,20937	1,298

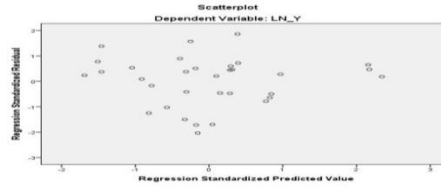
Sumber: Olahan Penulis Hasil Output SPSS

Dasar pengambilan keputusan dari uji autokorelasi bahwa Jika dw teletak diantara du dan (4-du yang artinya di model regresi tidak ada autokorelasi positif atau negatif, atau dapat diputuskan tidak terperoleh autokorelasi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk meneliti apakah model regresi memiliki ketidakseragaman perbedaan dari residual satu penelitian ke pengamatan lainnya.

Gambar 2. Dependensi Variabel Y



Sumber: Olahan penulis Output SPSS 22 (2023)

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa titik-titik tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat dikatakan bahwa data telah berdistribusi normal.

Regresi linear berganda memiliki hubungan dari antara linear antara satu variabel Dendependen (X) dengan variabel independen (Y). Adapun yang samaan regresi linear berganda adalah $Y = a + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \epsilon$. Regresi linear berganda didapatkan pada table 5.

B. Statistik Linear berganda

Tabel 5. Regresi Linear berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,491	,210		2,334	,027
kepemilikan institusional	,040	,029	,311	1,351	,187
Komite audit	,148	,043	,533	3,412	,002

a. Dependent Variable: DPR

Sumber: Olahan Penulis Output SPSS 22 (2023)

Berdasarkan Tabel 5 diatas hasil analisis regresi linear berganda didapatkan bahwa koefisien untuk variabel kepemilikan institusional 0,040 variabel komite audit sebesar 0,148 variabel dan konstanta sebesar 0,491.

1. Uji Signifikan Simultan (F-Test)

Uji F- test dibuatkan dengan menjelaskan bahwa semua item independen yang dimasukkan di model regresi berganda berpengaruh secara bersamaan bahkan item dependen.

Tabel 6. Uji F-test ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,868	3	,289	5,660	,004 ^b
Residual	1,482	29	,051		
Total	2,350	32			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), LN_X2, X1

Sumber: Olahan penulis Hasil Output SPSS 22 (2023)

Tabel 6 ini memiliki hasil uji simultan variabel kepemilikan institusional dan komite

audit dari hasil pengamatan dapat diperoleh kalau poin F hitung > F tabel di Sig 0,004

yaitu ($5,660 > 4,07$), maka dapat diputuskan kalau institusional di badan audit dengan simultan dipengaruhi pastinya di penghindaran pajak (ETR).

2. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi yaitu cakupan memperlihatkan cakupannya item dependen yang dapat disimpulkan oleh item independennya.

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df 1	df2	Sig.F Change
1	,608 ^a	,369	,304	,22609	,369	5,660	3	29	,004

a. Predictors: (Constant), X1-X2

b. Dependent Variable: DPR

Sumber: Olahan penulis Hasil Output SPSS 22 (2023)

Berdasarkan tabel 7 dapat diperhatikan kalau poin *R Square* 0,304 atau 30,4% maka dilihat kalau sebesar 30,4% poin X1 dan X2 memberikan nilai varian variasi terhadap variabel Y. Sedangkan poin sisanya 69,6% berpengaruh item lain yang tidak diteliti pada pengamatan ini. poin *Adjusted R Square* sebesar 0,304 yang artinya di jenis interval koefisien korelasi X1 dan X2 memiliki tingkat hubungan di variabel Y yang rendah. Variabel yang ada hubungannya dengan variabel-variabel lainnya, dan tidak mempengaruhi variabel lainnya yang tidak diamati oleh peneliti.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap penghindaran Pajak

Dari uji parameter individual (Uji t) mendapatkan poin t_{hitung} sebesar $1,351 < t_{tabel}$ sebesar 1,692 dengan ukuran signifikansi 0,187 ($sig > 0,05$) yang artinya tidak terdapat hubungan dan tidak signifikansi antara variabel terikat dan variabel bebas.

Pengamatan ini sejalan dengan penelitian yang dibuatkan oleh Nining dwi Rahmawati, Ivonne S. Saerang, Pauliana Van Rate (2013) yang menjelaskan kalau perusahaan lebih mendalam tentang likuditas jangka pendeknya untuk membiayai acara operasionalnya dan memenuhi kewajiban

jangka pendeknya dibandingkan dengan mendalamnya pembayaran pajak, karena pembayaran pajak adalah kas keluar bagi perusahaan. naiknya likuiditas maka naik juga kemampuan perusahaan membayar pajak bahkan kecilnya keuntungan yang dipakai di acara program badan.

2. Pengaruh Komite Audit Terhadap penghindaran Pajak

Sesuai yang didapatkan di parameter individual (Uji t) menghasilkan nilai t_{hitung} sebesar $3,412 > t_{tabel}$ sebesar 1,692 pada cakupan signifikansi 0,002 ($sig < 0,05$) yang berarti adanya hubungan dan signifikansi antara item terikat yaitu penghindaran pajak dengan variabel bebas yaitu X1. Ini berarti X1 memberikan pengaruh dan signifikansi adanya Y di perusahaan manufaktur sektor Perbankan. Pengamatan ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Wiwin Siswatini (2010). Hal ini kalau pajak yang dibayarkan kepada Negara diambil dari keuntungan bersih perusahaan, karena itu apabila perusahaan mengalami penurunan keuntungan.

3. Pengaruh Kepunyaan Institusional dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak (ETR)

Dari hasil Uji Signifikansi Parsial dapat diketahui kalau poin F_{hitung} sebesar 5,660

dengan poin signifikansi sebesar 0,004 sedangkan poin F_{Tabel} sebesar 4,07. perolehan tersebut menjelaskan kalau F_{Hitung} lebih besar dari poin F_{Tabel} atau F_{Hitung} sebesar 5,660 > F_{tabel} sebesar 4,07. Maka hipotesis dijadikan artinya X_1 dan X_2 memiliki pengaruh yang simultan terlihat kalau variabel Y pada perusahaan manufaktur perbankan di BEI.

Magee Senata (2010) rasio X_1 dan X_2 memiliki pengaruh yang simultan terhadap variabel Y pada perusahaan manufaktur sektor perbankan yang terdaftar di BEI. Dan juga Y memiliki pengaruh oleh variabel lain yang tidak diamati.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, N. A. dan Kurniasih, L. 2012, *Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance*. Jurnal Akuntansi dan Auditing, Vol. 8, No. 2, Mei 2012: 123-132.
- Azuar Juliandi, I. S. M. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis, Konsep dan Aplikasi (pertama). UMSU Press.
- Cahyono, Deddy Dyas. 2016. *Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER) dan Profitabilitas (Roa) terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Listing BEI Periode Tahun 2011 – 2013*. Journal Of Accounting, Volume 2 No.2 Maret 2016.
- Deni Aprilianto, 2018. *jurnal Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan*. jurnal
- Damayanti, Fitri. 2015. *Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance*. Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 5, No. 2, Oktober 2015, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Hayu, Hastari. 2012.
- Fathurrahman, 2021. *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Dan Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance*. Jurnal akuntansi
- Feldmann 2018. Defenisi pajak dan sistem perpajakan Indonesia. Jurnal
- Kasmir. 2015. Manajemen perbankan, Edisi 8. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Kasmir. 2015. Manajemen Perbankan, Edisi 13. Rajawali Pers. Jakarta
- Lanis, R., dan Richardson, G 2012. Corporate social responsibility and tax aggressiveness: a test of legitimacy theory. Accounting, Auditing dan Accountability Journal. Vol.26(1): 75-100
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan. Edisi revisi 2013*. Yogyakarta : Andi.
- Mankiw, N. Gregory. 2007. Makroekonomi, Edisi Keenam. Jakarta : Erlangga
- Masyitah, E. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PPN dan PPNBM. Accumulated Journal, 1(2), 89–103.
- Mir'atusholihah, Kumadji, S., & Ismono, B. 2015. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Perpajakan, 876(March), 868–876.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2019. Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan III. <https://www.ojk.go.id/>. Diakses tanggal 17 November 2021.
- Pohan. Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan dan Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Rori, Handri. 2013. *Analisis Penetapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan*. Jurnal EMBA, Vol.1 No. 3 : 410 – 418.
- Suandy, Erly. 2016. *Perencanaan Pajak*, Edisi 6. Jakarta : Salemba Empat.

- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Satro, A. 2021. Simsalabim, Pajak Bank Panin Disulap dari Rp 926 Miliar menjadi Rp 303 Miliar. <https://nasional.sindonews.com>. Diakses tanggal 30 Oktober 2021.
- Undang-Undang No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 28 tahun 2007.
- Undang-Undang Nomor 36 Pasal 4 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Kementerian Keuangan Negara